Jurnal Sosial Humaniora (JSH)
Beranda Jurnal : https://ejournal.suryabuanaconsulting.com/
ISSN: 3063-2722 DOI: https://doi.org/10.70214/7zagh748

Diplomasi Pangan Multilateral dan *Blue Economy* di Somalia: Peran Strategis Organisasi Internasional

Astiwi Inayah[1*] Nibras Fadhlillah[2], Isti Fauziah Bakhtiar[3]
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
*Corresponding author: astiwi.inayah@fisip.unila.ac.id

Abstract

Artikel ini mengkaji peran organisasi internasional dalam mengatasi kerawanan pangan kronis di Somalia melalui diplomasi pangan berbasis *blue economy*. Meskipun Somalia memiliki sumber daya maritim yang melimpah, tingginya tingkat kerawanan pangan serta berbagai tantangan tata kelola masih membatasi pemanfaatan potensi ekonomi biru untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana organisasi internasional berkontribusi dalam mengatasi tantangan tersebut melalui kerja sama multilateral dan pengelolaan sumber daya maritim. Penelitian ini menggunakan tipologi organisasi internasional dari Clive Archer yang memandang organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi lembaga terkait. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FAO menempati posisi sentral dengan menghubungkan fungsi penyusunan standar teknis, koordinasi kebijakan, dan mekanisme pendanaan. Sementara itu, EU NAVFOR berperan dalam menjaga keamanan jalur maritim, sedangkan WFP mendukung keberlangsungan distribusi pangan darurat. Namun, keterbatasan kapasitas domestik, fragmentasi mandat kelembagaan, dan lemahnya mekanisme koordinasi masih menjadi hambatan dalam transisi dari bantuan pangan darurat menuju kedaulatan pangan berbasis *blue economy*. Penelitian ini berkontribusi pada kajian diplomasi pangan multilateral dan tata kelola ekonomi biru di negara rentan dengan menunjukkan pentingnya peran organisasi internasional dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan berbasis maritim.

Keyword: Organisasi internasional, Diplomasi pangan, *Blue economy*, Somalia, Multilateralisme.

Pendahuluan

Somalia memperlihatkan kontradiksi antara besarnya potensi sumber daya kelautan dan berlanjutnya kerawanan pangan. Negara ini memiliki garis pantai sekitar 3.333 km dan sektor pertanian serta kelautan merupakan bagian penting dari struktur ekonomi dan mata pencaharian masyarakat (IGAD, 2024). Namun, ketergantungan pada sektor primer tidak dengan sendirinya menghasilkan ketahanan pangan karena masyarakat menghadapi kekeringan, banjir, konflik, keterbatasan infrastruktur, serta gangguan pada akses pasar dan produksi (Abdi dkk., 2026). Kondisi tersebut menjadikan ketahanan pangan Somalia bukan hanya persoalan ketersediaan pangan, tetapi juga persoalan kapasitas negara, keamanan, tata kelola sumber daya, dan ketahanan ekonomi rumah tangga (Waga, 2024).

Silakan kutip artikel ini sebagai: Inayah, et al. (2026). Diplomasi Pangan Multilateral dan Blue Economy di Somalia: Peran Strategis Organisasi Internasional. *Jurnal Sosial Humaniora* (JSH), 3(2), 142-158.

Kerentanan tersebut berkaitan erat dengan kondisi sektor perikanan. Somalia memiliki sumber daya laut yang besar, tetapi kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional masih rendah karena keterbatasan fasilitas pendaratan, rantai dingin, logistik, pengolahan pascapanen, dan akses pasar (Abdi dkk., 2026). Di sisi lain, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*) dapat mengurangi sumber daya yang tersedia bagi nelayan lokal dan berinteraksi dengan konflik serta ketidakamanan di wilayah (Jama dkk., 2022). Karena itu, hubungan antara laut dan pangan di Somalia tidak dapat dipahami hanya sebagai peluang ekonomi, melainkan sebagai persoalan tata kelola dan keamanan manusia.

Pangan akuatik memiliki peran penting dalam ketahanan pangan, nutrisi, mata pencaharian, dan pembangunan berkelanjutan. Sektor perikanan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan apabila rantai nilai, akses pasar, distribusi, dan keberlanjutan sumber daya dikelola secara inklusif (Ayilu dkk., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan sektor kelautan di Somalia memiliki potensi untuk menghubungkan tujuan ketahanan pangan dengan pembangunan ekonomi pesisir, tetapi hanya jika tata kelolanya mampu menghindari penguasaan manfaat oleh aktor yang memiliki modal dan kapasitas lebih besar (Croft dkk., 2024).

Konsep *blue economy* menjadi relevan dalam konteks tersebut karena menempatkan laut sebagai ruang ekonomi sekaligus ekosistem yang harus dikelola secara berkelanjutan (Wuwung, 2022). Namun, *blue economy* bukan konsep yang netral. Interpretasi yang menekankan pertumbuhan investasi dan nilai tambah dapat berbeda dengan interpretasi yang menekankan keadilan, akses masyarakat pesisir, konservasi, dan ketahanan sosial. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan konflik distribusi: pertumbuhan ekonomi kelautan belum tentu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil apabila manfaat, risiko, dan pengambilan keputusan tidak dibagi secara adil (Chen dkk., 2024). Dengan demikian, *blue economy* dalam penelitian ini dipahami sebagai tata kelola pembangunan berbasis sumber daya kelautan yang sekaligus memperhatikan keberlanjutan ekologi, distribusi manfaat, dan kapasitas masyarakat pesisir. Dalam konteks Somalia, perspektif tersebut relevan karena potensi perikanan belum otomatis menjadi ketahanan pangan akibat keterbatasan infrastruktur, kapasitas teknis, dan kesenjangan rantai nilai (Abdi dkk., 2026).

Keterlibatan organisasi internasional (OI) menjadi penting karena keterbatasan kapasitas domestik memperbesar kebutuhan Somalia terhadap pembiayaan, pengetahuan teknis, koordinasi, dan bantuan kemanusiaan. Food and Agriculture Organization (FAO) mendukung penguatan sektor perikanan, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan kapasitas (FAO Somalia, 2024), World Food Program (WFP) berfokus pada bantuan pangan dan logistik kemanusiaan (WFP, 2024) UNDP pada pemulihan, tata kelola, dan ketahanan (United Nations Development Programme, 2025), UNIDO pada pengembangan industri dan rantai nilai berbasis *blue economy*, sedangkan IGAD menyediakan platform koordinasi kawasan dan pengembangan *blue economy* (IGAD, 2024). EUNAVFOR ATALANTA membawa dimensi keamanan maritim dengan melindungi kapal WFP dan menjalankan tugas pencegahan pembajakan serta pemantauan IUU fishing (EUNAVFOR ATALANTA, 2025). Temuan mengenai peran yang berbeda tersebut juga konsisten dengan penelitian tentang Somalia

yang menunjukkan bahwa efektivitas institusi regional dibatasi oleh kompleksitas konflik, pengaruh eksternal, dan perbedaan kepentingan negara anggota (Waga, 2024).

Namun, menjelaskan OI hanya sebagai pelaksana program donor tidak cukup untuk membaca kasus Somalia. Clark dkk. (2026) menunjukkan bahwa staf organisasi internasional dapat memengaruhi perilaku dan tata kelola internasional melalui posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Literatur mengenai organisasi internasional juga menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan proses pengambilan keputusan memengaruhi kapasitas organisasi menghasilkan kebijakan dan menjalankan kewenangannya (Sommerer dkk., 2022). Perspektif ini melengkapi Cortell dan Peterson (2022) yang menegaskan bahwa diskresi tidak identik dengan otonomi, karena otonomi mengacu pada kemampuan organisasi menggunakan ruang kewenangannya secara relatif mandiri dari instruksi spesifik negara. Perspektif ini penting bagi Somalia karena *state-capacity gap* dapat membuat OI tidak hanya menyalurkan sumber daya, tetapi juga menjalankan fungsi yang dalam negara dengan kapasitas tinggi biasanya dilakukan oleh institusi domestik.

Diplomasi pangan juga memperlihatkan bahwa pangan memiliki dimensi politik internasional. Cabral dkk. (2024) menunjukkan bahwa *food diplomacy* berkaitan dengan partisipasi negara dalam sistem pangan global, termasuk langkah-langkah ketahanan pangan dan bantuan pangan kemanusiaan, sedangkan Koppenberg dkk. (2023) menunjukkan bahwa *food aid* memiliki hubungan kompleks dengan konflik dan kepentingan politik. Dalam penelitian ini, diplomasi pangan tidak dipahami sebagai *gastrodiplomacy* atau penggunaan kuliner sebagai citra negara, melainkan sebagai penggunaan kerja sama, bantuan, negosiasi, pengetahuan, dan pengaturan rantai pasok pangan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan lintas batas.

Meskipun berbagai studi tersebut memberikan landasan penting, terdapat dua celah analitis. Pertama, studi tentang Somalia dan *blue economy* banyak membahas satu sektor atau satu organisasi, sementara koordinasi antara FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP dalam satu kerangka diplomasi pangan belum banyak dianalisis secara terpadu. Kedua, literatur mengenai peran OI sering berhenti pada pertanyaan "apa yang dilakukan organisasi", belum cukup menjelaskan bagaimana kapasitas, pengetahuan, dan *state-capacity gap* menghasilkan kekuasaan dan otonomi organisasi (Reinsberg & Westerwinter, 2023). Celah kedua menjadi semakin penting ketika beberapa rezim internasional beroperasi pada ruang yang sama. Operasi keamanan maritim memiliki indikator keberhasilan yang berbeda dari program pembangunan dan bantuan pangan. Tumpang tindih mandat tersebut merupakan ciri *regime complexity* yang dapat menghasilkan komplementaritas sekaligus konflik antarorganisasi (Panke & Stapel, 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana enam organisasi internasional menjalankan fungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam diplomasi pangan berbasis *blue economy* di Somalia, sekaligus menjelaskan sumber dan batas kekuasaan mereka serta dinamika antar-rezim antara keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan. Kontribusi artikel terletak pada penggabungan tipologi. dengan perspektif kekuasaan dan otonomi OI serta analisis *regime complexity* untuk menjelaskan mengapa koordinasi antarorganisasi dapat

menghasilkan sinergi pada satu sisi, tetapi tetap menghadapi batas kelembagaan pada sisi lain.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami peran dan sinergi organisasi internasional dalam diplomasi pangan berbasis *blue economy* di Somalia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, interaksi, serta dinamika kerja sama antarorganisasi internasional yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana organisasi internasional menjalankan fungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Somalia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap laporan resmi organisasi internasional, dokumen kebijakan, laporan pembangunan, publikasi lembaga keuangan internasional, serta artikel ilmiah yang relevan. Sumber data utama berasal dari FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, WFP, World Bank, dan berbagai dokumen pemerintah Somalia yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengembangan *blue economy*. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan, program, dan bentuk kerja sama kelembagaan yang telah terdokumentasi secara resmi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini dipilih karena mampu membantu peneliti mengorganisasi data yang beragam secara sistematis sehingga hubungan antaraktor, program, dan kebijakan dapat dianalisis secara lebih komprehensif.Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tipologi organisasi internasional digunakan sebagai kerangka analisis utama. Setiap aktivitas FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP dikategorikan ke dalam fungsi organisasi internasional sebagai instrumen, arena, atau aktor independen berdasarkan mandat kelembagaan, peran kebijakan, serta praktik yang tercermin dalam dokumen. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang valid mengenai pola koordinasi dan kontribusi organisasi internasional dalam diplomasi pangan berbasis *blue economy* di Somalia.

Hasil dan Pembahasan

Tipologi Clive Archer, Blue economy, Diplomasi Pangan dan Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, OI menjadi sarana negara menyalurkan kebijakan, pendanaan, dan program; sebagai arena, OI menyediakan ruang bagi negosiasi, pertukaran informasi, dan pembentukan konsensus. Sedangkan, sebagai aktor, OI memiliki kapasitas untuk mengambil inisiatif dan memengaruhi kebijakan relatif melampaui fungsi sebagai perpanjangan kepentingan negara. Fungsi instrumen diidentifikasi melalui penyaluran bantuan, pembiayaan, teknologi, atau program, fungsi arena melalui fasilitasi perundingan dan koordinasi sedangkan, fungsi aktor melalui kapasitas menghasilkan kebijakan, standar, pengetahuan, dan inisiatif yang memengaruhi agenda nasional. Literatur kontemporer

menempatkan staf organisasi internasional sebagai birokrat yang dapat memengaruhi tata kelola global melalui proses pengambilan keputusan dan posisi kelembagaan mereka (Clark dkk., 2026). Administrasi internasional juga memiliki ruang diskresi dan kapasitas pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh desain kelembagaan (Sommerer dkk., 2022). Selain itu, Cortell dan Peterson (2022) menegaskan bahwa diskresi tidak identik dengan otonomi, melainkan otonomi mengacu pada kemampuan organisasi menggunakan ruang kewenangannya secara relatif mandiri dari instruksi spesifik negara. Dalam konteks Somalia sebagai *fragile state*, keterbatasan kapasitas fiskal, administratif, teknis, dan keamanan dapat menciptakan *state-capacity gap* yang memperbesar permintaan terhadap keahlian, koordinasi, dan sumber daya OI. Karena itu, fragilitas negara dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi yang dapat memperluas ruang pengaruh OI, tanpa berarti negara kehilangan seluruh otoritasnya.

Konsep *blue economy* digunakan untuk menjelaskan orientasi pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Wuwung dkk. (2022) menunjukkan bahwa *blue economy* memiliki beragam interpretasi dan tantangan implementasi, sementara Ayilu dkk. (2022) dan Croft dkk. (2024) menekankan pentingnya melihat risiko ketimpangan, akses, dan posisi perikanan skala kecil dalam agenda *blue economy*. Perkembangan literatur mengenai *blue economy* governance juga menempatkan *equity* sebagai unsur penting dalam pengelolaan laut (Chen dkk., 2024). Oleh karena itu, *blue economy* dalam penelitian ini tidak diposisikan hanya sebagai strategi pertumbuhan sektor kelautan, tetapi sebagai arena tata kelola yang mempertemukan kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, dan hak masyarakat pesisir. Dalam konteks Somalia, perspektif tersebut relevan karena potensi perikanan belum otomatis menjadi ketahanan pangan akibat keterbatasan infrastruktur, kapasitas teknis, dan kesenjangan rantai nilai (Abdi dkk., 2026).

Diplomasi pangan dipahami sebagai proses penggunaan pangan, bantuan, negosiasi, pengetahuan, dan kerja sama kelembagaan untuk mencapai tujuan politik dan ketahanan pangan dalam hubungan internasional. Cabral dkk. (2024) menunjukkan bahwa *food diplomacy* mencakup partisipasi negara dalam sistem pangan global, termasuk kebijakan ketahanan pangan dan bantuan pangan kemanusiaan, sedangkan kajian mengenai *food aid* menunjukkan bahwa hubungan bantuan pangan dan konflik sangat dipengaruhi oleh konteks politik serta mekanisme penyalurannya (Koppenberg dkk., 2023). Dalam penelitian ini, diplomasi pangan tidak dibatasi pada distribusi bantuan darurat, tetapi mencakup koordinasi kebijakan, penguatan kapasitas produksi, pengelolaan rantai nilai, serta pengamanan akses pangan. Kerangka tersebut menghubungkan diplomasi pangan dengan *blue economy* karena sumber daya perikanan dapat menjadi basis pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kerangka analisis selanjutnya menggunakan konsep *regime complexity* untuk membaca hubungan antar-OI dan perbedaan logika kelembagaan. Reinsberg dan Westerwinter (2023) menunjukkan bahwa tumpang tindih institusi dapat muncul ketika beberapa organisasi memiliki kompetensi yang saling beririsan, sedangkan Panke dan Stapel (2024) menunjukkan bahwa overlap dapat menghasilkan kerja sama, tetapi juga kompetisi, fragmentasi, dan kebutuhan koordinasi. Kerangka ini digunakan untuk

membaca tiga logika yang berinteraksi di Somalia: logika keamanan yang menonjol pada EU NAVFOR, logika kemanusiaan pada WFP, serta logika pembangunan pada FAO, UNDP, dan UNIDO. Dengan demikian, penelitian menggabungkan Archer untuk mengidentifikasi bentuk peran OI, perspektif *power* dan *autonomy* untuk menjelaskan sumber pengaruh OI, *blue economy* dan diplomasi pangan untuk menjelaskan substansi kebijakan, serta regime complexity untuk menganalisis hambatan dan peluang koordinasi antar-rezim.

Konteks Ketahanan Pangan dan Blue economy di Somalia

Somalia menunjukkan polemik antara kerawanan pangan yang tinggi dan potensi kelautan yang besar. Karena meskipun memiiki garis pantai terpanjang di Afrika, kontribusi sektor perikanan nasional hanya menyumbang **3 persen** terhadap PDB. Ini karena infrastruktur yang tidak efisien dan rantai dingin, atau penyimpanan dingin, yang kurang efisien (SDRB, 2025). Rendahnya kontribusi tersebut tidak lepas dari keterbatasan infrastruktur, khususnya fasilitas rantai dingin dan logistik yang tidak memadai sehingga meningkatkan kerugian pasca-panen dan melemahkan ketersediaan protein laut bagi masyarakat lokal. Data sosial-ekonomi berikut (Tabel 1) menunjukkan bahwa jutaan penduduk Somalia masih bergantung pada bantuan eksternal, dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi dan dominasi sektor primer dalam struktur PDB, sehingga masyarakat sangat rentan terhadap guncangan iklim dan fluktuasi harga pangan. Perbedaan keuntungan harian yang tajam antara pedagang ikan di Banadir yang dapat memperoleh sekitar 151 dolar Amerika Serikat per hari dan pedagang di Galmudug yang hanya sekitar 9 dolar Amerika Serikat (MFBE, 2025) ini mencerminkan ketimpangan akses pasar yang memperparah kerentanan pangan dan kesejahteraan komunitas pesisir.

Kerentanan dan potensi sekaligus ini dirangkum dalam Tabel 1 yang menyoroti parameter penting seperti panjang garis pantai, jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan, tingkat kemiskinan ekstrem, kontribusi sektor primer terhadap PDB, serta tingginya kerugian pasca-panen ikan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Tabel ini secara keseluruhan menegaskan bahwa sumber daya kelautan Somalia yang melimpah belum otomatis terkonversi menjadi ketahanan pangan tanpa perbaikan tata kelola ekonomi maritim dan intervensi organisasi internasional yang lebih terintegrasi.

Tabel 1. Indikator Kerentanan dan Sektor Unggul Somalia (2022-2024)

No	Parameter Ekonomi & Sosial	Status/Nilai	Dampak Terhadap Ketahanan Pangan
1	Garis Pantai	3.333 km	Potensi perikanan besar di pesisir Somalia (FAO, 2024)
2	Populasi Membutuhkan Bantuan	6,9 Juta	Tingginya kebutuhan bantuan kemanusiaan (United Nations in Somalia, 2024)
3	Tingkat kemiskinan	72%	Masih tingginya kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi (World Bank, 2024)

4	Kontribusi PDB sektor pertanian	75%	Dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi (Federal Government of Somalia, 2023)
5	Kerugian Pasca-Panen Ikan	Sangat Tinggi	Penurunan ketersediaan protein laut lokal (MFBE, 2025)

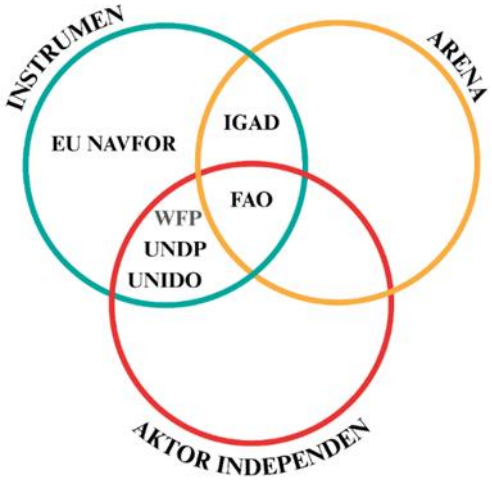
Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data FAO (2024), United Nations in Somalia (2024), World Bank (2024), Federal Government of Somalia (2023), dan MFBE (2025).

Persoalan tersebut juga terlihat pada perikanan. Infrastruktur rantai dingin dan logistik yang terbatas dapat meningkatkan kehilangan pascapanen dan mengurangi nilai ekonomi hasil tangkapan. Sementara itu, IUU *fishing* mempersempit ruang ekonomi nelayan lokal dan dapat berkontribusi pada dinamika konflik dan keamanan maritim (Abdi dkk., 2026). Karena itu, pengembangan *blue economy* di Somalia harus dipahami sebagai proyek institusional: produktivitas, pengolahan, distribusi, keamanan, dan tata kelola perlu berjalan bersamaan. Temuan ini sejalan dengan literatur perikanan skala kecil yang menekankan bahwa keberhasilan *blue economy* membutuhkan pengakuan terhadap aktor lokal serta distribusi manfaat yang adil (Ayilu dkk., 2022).

Implikasinya bagi diplomasi pangan adalah adanya kebutuhan untuk menghubungkan fungsi jangka pendek dan jangka panjang. Bantuan pangan WFP dibutuhkan untuk merespons kebutuhan segera, tetapi keberlanjutan ketahanan pangan memerlukan kapasitas produksi, mata pencaharian, dan tata kelola sumber daya. Di titik ini, *blue economy* dapat berfungsi sebagai jembatan antara bantuan dan pembangunan karena perikanan menyediakan pangan sekaligus sumber pendapatan. Namun, hubungan tersebut hanya berlaku apabila pembangunan kelautan tidak menghasilkan ekstraksi sumber daya yang memperburuk ketimpangan sosial atau mengurangi akses masyarakat pesisir (FAO, 2024).

Analisis Peran Organisasi Internasional dalam Diplomasi Pangan Berbasis Blue economy

Pemetaan peran organisasi internasional di Somalia menunjukkan konfigurasi yang berlapis antara fungsi instrumen, arena, dan aktor independen, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 1.



Gambar 1: Tipologi Peran Organisasi Internasional di Somalia

Sumber: Peneliti (2025)

FAO menempati posisi yang unik karena berada di titik temu tiga peran, menjadikannya sekaligus sebagai saluran pendanaan dan transfer pengetahuan teknis, forum perundingan kebijakan pangan dan perikanan berkelanjutan, serta aktor epistemik yang berwenang menetapkan standar dan pedoman pengelolaan perikanan. Sebagai instrumen, FAO menyalurkan program *Blue Growth*, penguatan rantai nilai perikanan, dan *capacity building* kepada pemerintah Somalia dan komunitas pesisir melalui dukungan teknis dan proyek percontohan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Sebagai arena, FAO menjadi ruang bagi perumusan dan sosialisasi norma global terkait pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, sementara sebagai aktor independen, organisasi ini memiliki otoritas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan standar global yang mempengaruhi agenda nasional Somalia di bidang *blue economy*.

IGAD berperan terutama sebagai arena politik kawasan dan instrumen harmonisasi kebijakan regional, dengan menyediakan platform bagi negara-negara Tanduk Afrika untuk merumuskan agenda bersama terkait *blue economy* dan ketahanan pangan lintas batas. Dalam kerangka Archer, IGAD memfasilitasi pertemuan, dialog kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi regional, tetapi kapasitasnya sebagai aktor independen lebih terbatas dibanding FAO karena masih sangat bergantung pada dinamika geopolitik dan kepentingan negara anggota. Pengaruh IGAD sebagai aktor independen lebih dibatasi oleh kepentingan negara anggota dan dinamika politik kawasan. Dalam konteks tersebut, IGAD menunjukkan bahwa menjadi forum regional tidak otomatis menghasilkan otonomi birokratis yang tinggi. Kasus IGAD juga memperlihatkan bahwa OI berada dalam hubungan dua arah dengan negara anggota. Negara membutuhkan IGAD untuk koordinasi, tetapi negara juga dapat membatasi tindakan organisasi ketika agenda regional bertentangan dengan kepentingan domestic (Waga, 2024).

EU NAVFOR menempati posisi penting sebagai instrumen keamanan yang melindungi jalur logistik pangan dan mengurangi risiko pembajakan serta kejahatan maritim lainnya di sekitar pesisir Somalia melalui Operasi Atlanta. Peran EU NAVFOR sebagai instrumen terlihat dari mandatnya untuk mengawal kapal-kapal WFP dan mitra kemanusiaan lain, sehingga memastikan distribusi bantuan pangan tetap berjalan, namun keterlibatannya sebagai arena perundingan dan aktor independen relatif terbatas karena fokus utamanya berada pada operasi militer dan penegakan keamanan di laut. Organisasi dan operasi militer dapat memiliki ruang diskresi operasional dalam menentukan prioritas, prosedur, dan bentuk pelaksanaan mandat. Karena itu, lebih tepat menempatkan EU NAVFOR sebagai instrumen yang memiliki diskresi operasional, tetapi tidak memiliki ruang agenda-setting pembangunan sebesar FAO. Pembedaan ini penting agar "instrumen" tidak disamakan dengan "pasif". Literatur mengenai birokrasi internasional menunjukkan bahwa diskresi merupakan salah satu mekanisme yang dapat menghasilkan variasi perilaku institusi meskipun tujuan formal organisasi tetap ditetapkan oleh aktor antar-pemerintah (Sommerer, 2022).

UNDP dan UNIDO memperkuat dimensi pembangunan sosial ekonomi dan industrialisasi dalam arsitektur *blue economy* Somalia, sehingga keduanya lebih menonjol sebagai aktor independen dan instrumen dibanding sebagai arena. UNDP berfokus pada pemberdayaan komunitas pesisir, peningkatan resiliensi, dan tata kelola lokal, misalnya melalui dukungan kewirausahaan berbasis perikanan dan penguatan pemerintahan lokal dalam mengelola sumber daya pesisir. Sementara UNIDO di sisi lain memusatkan intervensinya pada pengembangan rantai nilai pengolahan hasil laut dan industrialisasi berbasis sumber daya kelautan, sehingga berperan sebagai instrumen yang menghubungkan investasi, teknologi, dan standar industri dengan peluang pengembangan industri perikanan Somalia. UNDP dan UNIDO dapat dipahami sebagai aktor independen ketika menginisiasi program yang tidak semata-mata mengikuti agenda satu negara tertentu, namun keterbatasan investasi swasta dan risiko keamanan tinggi membuat kapasitas keduanya sebagai pendorong industrialisasi *blue economy* belum optimal.

WFP memegang peran sentral dalam dimensi bantuan kemanusiaan dan logistik pangan, dengan fokus pada distribusi pangan dan penyaluran bantuan nutrisi kepada kelompok paling rentan di Somalia. Sebagai instrumen, WFP menjadi kanal bantuan donor internasional untuk meredam dampak langsung krisis pangan, sementara sebagai aktor independen, lembaga ini memiliki kapasitas untuk merancang skema intervensi yang menggabungkan bantuan pangan darurat dengan program penguatan ketahanan pangan komunitas. Namun, organisasi juga menjalankan fungsi sebagai aktor kebijakan melalui penentuan prioritas penerima, logistik, jenis intervensi, dan desain program transisi. Karena keputusan tersebut dibuat dalam batas mandat kemanusiaan, otonomi WFP bersifat situasional dan dibatasi oleh pendanaan, prinsip kemanusiaan, serta kondisi akses di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa label "aktor independen" perlu dipahami secara proporsional. OI tidak perlu bebas sepenuhnya dari donor untuk memiliki pengaruh. Kapasitas mengalokasikan sumber daya, menetapkan prioritas, dan mengelola informasi

sudah merupakan bentuk agensi yang bermakna. Namun, ketika pendanaan donor berubah, ruang tersebut dapat menyempit. Dengan demikian, WFP memperlihatkan keterkaitan antara sumber daya material dan otonomi birokratis

Berdasarkan Gambar 1 di atas terlihat bahwa seluruh organisasi internasional yang diteliti menjalankan fungsi sebagai instrumen, yang berarti mereka menjadi saluran bagi kebijakan dan pendanaan dari negara donor untuk diimplementasikan di Somalia. Namun, posisi FAO unik karena lokasinya di titik temu ketiga lingkaran. Lokasi ini menunjukkan bahwa FAO adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai alat teknis, tempat perundingan kebijakan pangan di seluruh dunia, dan pihak independen yang memiliki otoritas untuk menetapkan standar perikanan berkelanjutan (Haniyah dkk., 2025). Sementara itu, IGAD berfungsi sebagai platform politik regional bagi negara-negara Tanduk Afrika, mengambil peran yang berbeda dari berbagai sumber daya dan lingkungan (IGAD, 2024).

Tabel 2 berikut merangkum fokus strategis, pendekatan *blue economy*, tantangan utama yang dihadapi masing-masing organisasi. Bagi tiga organisasi yaitu FAO, IGAD, dan EU NAVFOR, tabel tersebut menegaskan pentingnya keterhubungan antara standar teknis, integrasi regulasi kawasan, dan perlindungan jalur distribusi pangan. Ketiga organisasi ini membentuk tulang punggung diplomasi pangan berbasis *blue economy* di Somalia, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesenjangan kapasitas lokal dan ketegangan antara mandat keamanan dan pembangunan.

Tabel berikut mengevaluasi sinergi antarorganisasi internasional dengan menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh masing-masing organisasi.

Tabel 2. Evaluasi Sinergi dan Peran Organisasi Internasional dalam Diplomasi Pangan

Organisasi	**Fokus Strategis**	**Pendekatan *Blue economy***	**Peran dalam Konsep OI**	**Tantangan Utama (Hambatan Analitis)**
FAO	*Blue Growth*, rantai nilai perikanan, *capacity building*	Produksi perikanan berkelanjutan, konservasi laut, teknologi pangan	Aktor Independen, Instrumen, Arena	Kesenjangan antara standar global dan kapasitas teknis lokal (FAO, 2024).
IGAD	Diplomasi kawasan, kebijakan regional	Harmonisasi regulasi, integrasi kawasan	Arena, Instrumen	Konflik kepentingan geopolitik antar-negara anggota di Tanduk Afrika

Organisasi	Fokus Strategis	Pendekatan *Blue economy*	Peran dalam Konsep OI	Tantangan Utama (Hambatan Analitis)
				(IGAD, 2024; Waga, 2024)
EU NAVFOR	Keamanan laut, perlindungan logistik pangan	Menjaga stabilitas jalur distribusi pangan laut	Instrumen	Risiko asimetri antara mandat militer dan kebutuhan pembangunan sosial nelayan (EUNAVFOR ATALANTA, 2025; International Maritime Organization, 2023).
UNDP	Pemberdayaan komunitas pesisir, resiliensi	Kewirausahaan perikanan, tata kelola lokal	Aktor Independen, Instrumen	Fragmentasi tata kelola dan kebutuhan penguatan institusi di tingkat federal dan negara bagian (United Nations Development Programme, 2025)
UNIDO	Industrialisasi berbasis hasil laut	Rantai nilai pengolahan hasil perikanan	Aktor Independen, Instrumen	Keterbatasan investasi, kapasitas teknologi, dan pengembangan rantai nilai (Federal Government of Somalia, 2023; United Nations Industrial Development Organization, 2024)

Organisasi	Fokus Strategis	Pendekatan *Blue economy*	Peran dalam Konsep OI	Tantangan Utama (Hambatan Analitis)
WFP	Distribusi pangan, logistik kemanusiaan	Penyaluran pangan laut ke komunitas rentan	Aktor Independen, Instrumen	Fluktuasi pendanaan donor dan tekanan kebutuhan kemanusiaan (WFP, 2024).

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan FAO (2024), IGAD (2024), EUNAVFOR ATALANTA (2025), UNDP (2025), UNIDO (2024), WFP (2025), dan Nyamanhindi (2025).

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa ketiga organisasi yaitu UNDP, UNIDO, dan WFP menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi tata kelola di tingkat federal, minimnya investasi sektor swasta, serta fluktuasi pendanaan donor yang berdampak pada keberlanjutan program. Pada saat yang sama, sinergi antara pemberdayaan komunitas pesisir, industrialisasi hasil laut, dan distribusi pangan darurat menentukan apakah *blue economy* dapat benar-benar berkontribusi pada pengurangan kerawanan pangan atau justru memperkuat ketergantungan pada bantuan jangka pendek. Pemetaan di atas juga menunjukkan posisi FAO yang khas sebagai organisasi yang secara simultan menjalankan tiga peran dalam tipologi Archer. Sebagai instrumen, FAO menyalurkan standar teknis, pendanaan, dan program *capacity building* dari negara-negara donor ke pemerintah Somalia dan komunitas pesisir. Sebagai arena, FAO menjadi forum perundingan kebijakan pangan global dan regional yang menetapkan pedoman pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pada saat yang sama, sebagai aktor independen, FAO memiliki kewenangan epistemik untuk mendefinisikan kerangka *blue economy* dan mempengaruhi agenda nasional Somalia melalui rekomendasi kebijakan dan proyek percontohan. Pola ini menyebabkan FAO memiliki struktur otoritas teknis yang lebih kuat.

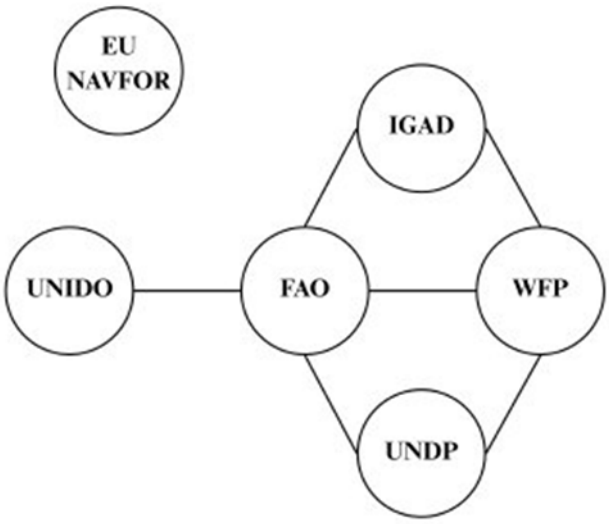
Hambatan koordinasi antarorganisasi internasional di Somalia tidak hanya berasal dari lemahnya komunikasi, tetapi juga dari perbedaan logika rezim. EU NAVFOR berada terutama dalam rezim keamanan maritim, WFP dalam rezim kemanusiaan, FAO, UNDP, dan UNIDO dalam rezim pembangunan, sedangkan IGAD berfungsi sebagai arena koordinasi regional. Masing-masing membawa tujuan, instrumen, horizon waktu, dan ukuran keberhasilan yang berbeda. Dalam perspektif *regime complexity*, tumpang tindih institusi dapat memperluas kapasitas penyelesaian masalah, tetapi juga meningkatkan biaya koordinasi dan fragmentasi kebijakan (Panke & Stapel, 2024). Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa keberhasilan keamanan tidak otomatis menghasilkan keberhasilan pembangunan. Pengurangan pembajakan dan perlindungan pelayaran dapat membuka kondisi operasional bagi distribusi pangan dan aktivitas ekonomi, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan rantai dingin, akses pasar, peningkatan pendapatan nelayan, atau kapasitas kelembagaan. Sebaliknya, program mata

pencaharian dan penguatan institusi lokal membutuhkan lingkungan keamanan yang relatif stabil. Dengan demikian, hubungan EU NAVFOR dengan FAO, UNDP, dan UNIDO lebih tepat dipahami sebagai hubungan komplementer tetapi tidak simetris: keamanan berfungsi sebagai *enabling condition*, sedangkan pembangunan mengubah kondisi tersebut menjadi kapasitas ekonomi dan ketahanan jangka panjang (International Maritime Organization, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan menghapus perbedaan mandat, melainkan membangun *policy coherence* lintas rezim. Dalam konteks diplomasi pangan berbasis *blue economy*, koordinasi perlu menghubungkan indikator keamanan, bantuan, dan pembangunan melalui perencanaan bersama, pertukaran informasi, serta evaluasi lintas sektor. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan temuan bahwa kerja sama antarorganisasi tidak muncul secara otomatis, tetapi bergantung pada kebutuhan, insentif, dan kapasitas masing-masing organisasi (Panke & Stapel, 2024).

Dinamika Jaringan Koordinasi Multilateral

Keberhasilan program *blue economy* di Somalia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas masing-masing organisasi internasional secara terpisah, tetapi juga oleh kualitas jaringan koordinasi multilateral di antara mereka dan dengan institusi nasional. Gambar 2 berikut menunjukkan model jaringan "pusat-dan-jari-jari" (*hub-and-spoke*), di mana FAO menempati posisi sebagai koordinator teknis utama yang menghubungkan berbagai aktor lain (termasuk IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP) dalam satu arsitektur kebijakan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan pembangunan pesisir.



Gambar 2: Model Jaringan Koordinasi dan Kolaborasi Antar-Organisasi.
Sumber: Peneliti (2025)

Dalam model ini, FAO membutuhkan dukungan WFP untuk menjembatani aspek logistik dan distribusi pangan serta peran EU NAVFOR dalam menjamin keamanan jalur

laut agar intervensi teknis di sektor perikanan dan *blue economy* benar-benar dapat menjangkau komunitas pesisir (EUNAVFOR ATALANTA, 2025). Dinamika koordinasi ini menunjukkan bahwa diplomasi pangan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kombinasi antara mandat keamanan, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan jangka panjang yang terkoordinasi.

Jarak koordinasi yang masih tampak antara aktor keamanan seperti EU NAVFOR dan lembaga pembangunan seperti UNDP dan UNIDO menandakan adanya pemisahan mandat antara sektor keamanan dan ekonomi yang belum sepenuhnya terjembatani. Hal ini sejalan dengan kajian tentang Somalia yang menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama regional dibatasi oleh kompleksitas konflik, pengaruh eksternal, dan perbedaan kepentingan negara anggota (Waga, 2024). Dengan kata lain, keberhasilan *blue economy* sebagai pilar kedaulatan pangan akan terbatas pada proyek percontohan tanpa adanya wadah koordinasi yang benar-benar berkolaborasi.

Tantangan Struktural dan Hambatan Sinergi

Konfigurasi peran FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP secara teoritis membentuk arsitektur yang relatif lengkap untuk mendukung diplomasi pangan berbasis *blue economy*, terdapat beberapa hambatan struktural yang membatasi efektivitas sinergi tersebut. Pertama, terdapat kesenjangan antara standar global yang dipromosikan FAO dengan kapasitas teknis lokal di Somalia, sehingga implementasi prinsip perikanan berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah sering kali tersendat di tingkat praksis. Kedua, konflik kepentingan geopolitik di antara negara-negara anggota IGAD dan fragmentasi tata kelola di tingkat federal Somalia melemahkan upaya harmonisasi regulasi dan konsolidasi agenda *blue economy* nasional. Ketiga, risiko keamanan yang tinggi di wilayah pesisir dan laut Somalia mengurangi minat investasi sektor swasta serta mendorong EU NAVFOR untuk tetap berfokus pada mandat militer, sehingga integrasi antara agenda keamanan maritim dan pembangunan sosial-ekonomi komunitas nelayan belum berjalan optimal.

Keempat, ketergantungan berkelanjutan pada pendanaan donor dan fluktuasi alokasi anggaran kemanusiaan menekan ruang gerak WFP untuk secara konsisten mengalokasikan bantuan nutrisi dan mengembangkan skema transisi menuju ketahanan pangan jangka panjang. Kondisi ini tercermin dalam laporan tahunan WFP yang menunjukkan tekanan kebutuhan dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan operasi di Somalia (World Food Programme, 2025). Kondisi tersebut berkontribusi pada pola di mana bantuan pangan darurat tetap dominan, sementara agenda kedaulatan pangan berbasis *blue economy* berjalan lebih lambat daripada yang diharapkan; tanpa pembenahan koordinasi lintas-aktor dan penguatan kelembagaan domestik, *blue economy* berisiko hanya berhenti pada proyek-proyek percontohan yang tidak terlembagakan secara nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pangan berbasis *blue economy* di Somalia ditopang oleh konfigurasi kompleks enam organisasi internasional, yakni FAO,

IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP. Dengan menggunakan tipologi Clive Archer, terlihat bahwa FAO menempati posisi hub sebagai instrumen, arena, dan aktor independen yang menghubungkan standar teknis, forum perundingan kebijakan, dan pendanaan pembangunan. IGAD berfungsi sebagai arena politik regional yang mencoba mengharmonisasikan regulasi, sementara EU NAVFOR berperan sebagai instrumen keamanan yang menjaga jalur distribusi pangan di laut. UNDP dan UNIDO memperkuat dimensi pemberdayaan dan industrialisasi lokal, sedangkan WFP mempertahankan fungsi distribusi pangan darurat bagi kelompok paling rentan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa transisi dari ketergantungan pada bantuan darurat menuju kedaulatan pangan berbasis *blue economy* masih terhambat oleh kapasitas domestik yang terbatas, fragmentasi mandat lembaga, dan lemahnya platform koordinasi nasional. Di satu sisi, keberadaan EU NAVFOR dan WFP sangat penting untuk menjaga stabilitas jangka pendek melalui perlindungan jalur logistik dan penyediaan bantuan nutrisi. Namun di sisi lain, dominannya logika bantuan kemanusiaan dibandingkan penguatan tata kelola dan industrialisasi perikanan berisiko memperpanjang pola ketergantungan dan menghambat konsolidasi agenda *blue economy* Somalia.

Dalam konteks organisasi internasional, temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana satu organisasi seperti FAO dapat secara simultan beroperasi sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam konteks negara rapuh (*fragile state*) seperti Somalia. Konfigurasi *hub-and-spoke* yang menempatkan FAO sebagai pusat koordinasi teknis sekaligus mengaitkan agenda keamanan (EU NAVFOR), integrasi kawasan (IGAD), pembangunan dan industrialisasi (UNDP, UNIDO), serta bantuan kemanusiaan (WFP) menyoroti pentingnya melihat organisasi internasional bukan hanya sebagai agen tunggal, tetapi sebagai simpul dalam jaringan kebijakan multilevel. Dalam konteks *blue economy* dan diplomasi pangan, temuan penelitian ini juga menawarkan kontribusi dengan memindahkan fokus dari pembahasan sektoral, misalnya hanya pada satu lembaga atau satu jenis intervensi, menuju analisis koordinasi integratif enam organisasi internasional utama sekaligus. Pendekatan ini melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang menonjolkan pentingnya integrasi standar multilateral dan kapasitas domestik, dengan menambahkan dimensi jaringan koordinasi multilateral di sektor maritim dan pangan pada negara-negara pantai rapuh.

Penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi pangan berbasis *blue economy* di negara rapuh perlu dipahami sebagai proses jangka panjang yang menggabungkan logika bantuan darurat, penguatan tata kelola, dan transformasi struktural rantai nilai maritim. Dengan demikian, temuan mengenai peran dan sinergi FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP di Somalia diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan studi komparatif di kawasan Tanduk Afrika maupun negara-negara lain yang tengah mengupayakan *blue economy* sebagai strategi keluar dari krisis ketahanan pangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan lembaga pemerintah Somalia dalam bentuk pembentukan platform koordinasi nasional *blue economy* yang secara formal menghubungkan FAO, IGAD, EU NAVFOR, UNDP, UNIDO, dan WFP dengan kementerian terkait di tingkat federal dan negara bagian. Mekanisme *joint programming* antara aktor keamanan maritim dan agen pembangunan juga diperlukan agar intervensi keamanan di laut terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi pesisir dan industrialisasi

hasil laut. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data sekunder dan belum mengkaji secara mendalam peran aktor swasta maupun dinamika politik domestik Somalia. Studi lanjutan dapat mengembangkan analisis komparatif dengan negara-negara lain di kawasan Tanduk Afrika atau menggali perspektif komunitas pesisir melalui penelitian lapangan.

Referensi

Abdi, M. H. S., Seidu, I., Bajpai, M., & Sivakumar, A. (2026). Aquaculture for food security and climate resilience in Somalia: Opportunities, challenges, adaptive pathways and policy recommendations. *Bioresource Technology Reports*, *33*, 102480. https://doi.org/10.1016/j.biteb.2025.102480

Ayilu, R. K., Fabinyi, M., & Barclay, K. (2022). Small-scale fisheries in the blue economy: Review of scholarly papers and multilateral documents. *Ocean & Coastal Management*, *216*, 105982. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105982

Cabral, O., Lavrador, L., Orduna, P., & Moreira, R. (2024). Gastronomy as a diplomatic tool: A systematic literature review. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, *38*, 101072. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2024.101072

Chen, M., Wang, Y., & Xu, Z. (2024). A framework for assessing the blue equity of social-ocean systems in marine governance transformation. *Frontiers in Marine Science*, *11*, 1403194. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1403194

Clark, R., Dolan, L. R., & Jost, T. (2026). Bureaucratic influence in international politics. *Annual Review of Political Science*, *29*, 455–474. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032624-014313

Cortell, A. P., & Peterson, S. (2022). Autonomy and international organisations. *Journal of International Relations and Development*, *25*(2), 399–424. https://doi.org/10.1057/s41268-021-00243-x

Croft, F., Breakey, H., Voyer, M., Cisneros-Montemayor, A. M., Issifu, I., Solitei, M., Moyle, C., Campbell, B., Barclay, K., Benzaken, D., Bodwitch, H., Fusco, L., Garcia Lozano, A., Ota, Y., Pauwelussen, A., Schutter, M., Singh, G., & Pouponneau, A. (2024). Rethinking blue economy governance—A blue economy equity model as an approach to operationalise equity. *Environmental Science & Policy*, *155*, 103710. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103710

EUNAVFOR ATALANTA. (2025). *Operation Atalanta: Updated information May 2025*. European Union Naval Force ATALANTA. https://eunavfor.eu/sites/default/files/2025-06/OPERATION%20ATALANTA%20-%20Updated%20information%20MAY25.pdf

FAO. (2024). *The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd0683en

FAO Somalia. (2024). *USAID-funded Reducing Communities' Vulnerability to External Shocks (RECOVER) Project*. Food and Agriculture Organization of the United

Nations. https://www.fao.org/somalia/news/details/USAID-funded-Reducing-Communities-Vulnerability-to-External-Shocks-%28RECOVER%29-Project/en

Federal Government of Somalia. (2023). *Statement during the 20th Session of the UNIDO General Conference: General Debate*. United Nations Industrial Development Organization. https://downloads.unido.org/ot/32/54/32547421/Somalia%20-%20General%20Debate.pdf

Haniyah, G. A., Ginanjar, Y., & Harikesa, I. W. A. (2025). Peran World Food Programme dalam mengatasi krisis pangan di Somalia tahun 2021–2023. *Global Insight Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.3844

IGAD. (2024). *Somalia Blue Economy inter-ministerial coordination and resource mobilisation meeting*. https://igad.int/somalia-blue-economy-inter-ministerial-coordination-and-resource-mobilisation-meeting/

International Maritime Organization. (2023). *Strengthening maritime security in the Federal Republic of Somalia*. https://www.imo.org/en/mediacentre/pages/whatsnew-1953.aspx

Jama, A. K. A., Ariffin, M. I., & Yusof, S. A. (2022). Economic impacts of illegal, unregulated and unreported fishing activities on artisanal fishing in Somalia. *Journal of Somali Studies*, *9*(1). https://hdl.handle.net/10520/ejc-aa_joss_v9_n1_a3

Koppenberg, M., Mishra, A. K., & Hirsch, S. (2023). Food aid and violent conflict: A review and empiricist's companion. *Food Policy*, *121*, 102542. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102542

MFBE. (2025). *Fish price assessment study (baseline) report*. Ministry of Fisheries and Blue Economy.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Mitchell, S. M., & Schmidt, C. J. (2024). Insecure fisheries: How illegal, unreported, and unregulated fishing affects piracy. *Conflict Management and Peace Science*, *41*(3). https://doi.org/10.1177/07388942231174174

Panke, D., & Stapel, S. (2024). Cooperation between international organizations: Demand, supply, and restraint. *The Review of International Organizations*, *19*, 269–305. https://doi.org/10.1007/s11558-023-09506-3

Phayal, A., Gold, A., Maharani, C., Palomares, M. L. D., Pauly, D., Prins, B., & Riyadi, S. (2024). All maritime crimes are local: Understanding the causal link between illegal fishing and maritime piracy. *Political Geography*, *109*, 103069. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103069

Reinsberg, B., & Westerwinter, O. (2023). Institutional overlap in global governance and the design of intergovernmental organizations. *The Review of International Organizations*, *18*, 693–724. https://doi.org/10.1007/s11558-023-09488-2

SDRB. (2025). *Somalia Development and Reconstruction Bank. Somali Development and Reconstruction Bank*. https://sdrb.gov.so/unlocking-somalias-untapped-blue- economy/

Sommerer, T. , S. T. , T. J. , & L. M. (2022). *Decision-making in international organizations: Institutional design and performance. The Review of International Organizations*.

United Nations Development Programme. (2025). *UNDP Somalia Annual Report 2025. United Nations Development Programme.* . https://www.undp.org/somalia/publications/undp-somalia-annual-report 2025

United Nations in Somalia. (2024). *Humanitarian partners seek US$1.6 billion to assist 5.2 million people in Somalia in 2024*. https://somalia.un.org/en/259189-humanitarian-partners-seek-us16-billion-assist-52-million-people-somalia-2024

Waga, A. A. (2024). Navigating chaos: IGAD's efforts Amidst Somalia's Governance crisis. *Heliyon*, *10*(18), e37941. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37941

WFP. (2024). *Somalia annual country report 2024. World Food Programme.*

World Bank. (2023). *Macro poverty outlook for Somalia: April 2023*. World Bank. http://documents.worldbank.org/

World Bank. (2024). *Macro poverty outlook for Somalia: April 2024. World Bank Group*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents- reports/document detail/099608504052412963

World Food Programme. (2025). *Annual country report 2025: Somalia. World Food Programme.* https://www.wfp.org/publications/annual-country-reports-somalia

Wuwung, L. , C. F. , B. D. , A. K. , G. C. , R. C. , & V. M. (2022). Global blue economy governance—A methodological approach to investigating blue economy implementation. *Frontiers in Marine Science*.